

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Selasa, 10 Juni 2025

ACARA :

**PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB.
PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KAB. PONOROGO TAHUN
ANGGARAN 2024**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :
“ PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO
TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB.
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024 “.

H a r i	:	Selasa
Tanggal	:	10 Juni 2025
Waktu	:	Pukul 10.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. 2 Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat rapat	:	Terbuka untuk umum
Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara: Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Ponorogo Terhadap Usul Rancangan Peraturan Daerah Kab. Ponorogo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Ponorogo Tahun Anggaran 2024.
Pimpinan rapat	:	Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris	:	Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	:	6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	:	5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	:	5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	:	4 Orang;
Jumlah	:	45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	8 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	6 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	:	4 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	:	4 Orang;

6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 3 Orang;
Jumlah	: 37 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Tri Suryati, A.Md.
3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
4. Fikso Rubianto
5. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
6. Mahfut Arifin, S.Sos.
7. Mashudi
8. Mujiatin
9. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
10. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
11. Siswandi
12. Teguh Pujianto
13. Sunyoto, S.Pd.
14. Riyanto, S.IP.
15. Wahyudi Purnomo, M.Si.
16. H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
17. Sukirno, S.H.
18. Agus Subiyantoro
19. Pamuji, S.Pd.
20. Agus Mustofa Latief H.
21. Sunarto, S.Pd.
22. Isnani, S.Pd.
23. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
24. Eka Rekno Setyani, S.H.
25. Anik Suharto, S.Sos.
26. Drs. Mulyono
27. Agus Suwito
28. Elvis Wibisono
29. Binti Rahmawati, S.Pd.
30. Widodo, S.H.
31. Ayatullah Ali Syari'ati, S.H.
32. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
33. Kateni, S.H.
34. Muryanto, S.IP.

- 35. Chirstine Hery P., S.E.
- 36. Abu Kohar
- 37. Ribut Riyanto, S.H.

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 4 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 1 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 3 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;
Jumlah	: 10 Orang

Yaitu :

- 1. Suhari, S.H.
- 2. Evi Dwitasari, S.Sos.
- 3. Drs. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
- 4. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
- 5. Dr. H. Burhanudin
- 6. Sunarto, S.Pd.
- 7. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
- 8. Ghufron Ridlo'i
- 9. Imam Mustofa
- 10. Kateni, S.H.

Eksekutif yang hadir :

1. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.	: Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. AKBP Anton Prasetyo, S.H., S.I.K., M.Si.	: Kapolres Ponorogo;
3. Letkol Inf. Dwi Soerjono	: Komandan Kodim 08/02;
4. Nur Hayati	: Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo;
5. Bambang Suhendro	: Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ponorogo;
6. Harjono	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ponorogo;
7. Bambang	: Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Ponorogo;
8. Seni	: Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;

9. Agus Sugiarto	: Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Ponorogo;
10. Suko Widodo	: BKPSDM Kabupaten Ponorogo;
11. Marsanto	: BPBD Kabupaten Ponorogo;
12. Bambang Windu	: Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo;
13. Dwi Cahyanto	: Satpol – PP Kabupaten Ponorogo;
14. Tri Susilo	: Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
15. Farida	: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
16. Fifi	: Disbudparpora Kabupaten Ponorogo;
17. Teguh Budi P.	: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
18. dr. Pretty M.	: RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;
19. Nora Y.	: RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
20. Anik Yuli	: Dinas Sosial & P3A Kabupaten Ponorogo;
21. Henry	: DPPKB Kabupaten Ponorogo;
22. Etik M.	: DPMTSP Kabupaten Ponorogo;
23. Harminto	: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
24. Suko Kartono	: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
25. M. Tunggal S.	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
26. Yunita K.	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
27. Budi Jatmoko	: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
28. Setyo Budiyo	: Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
29. Eko Bagus P.	: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
30. Agus Sriwahyudi	: Dinas Perpustakaan Kabupaten Ponorogo;
31. Indra Aji	: Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo;
32. Citra	: Bagian Tata Pemerintahan & Kerjasama Setda Kabupaten Ponorogo;
33. Talita R.N.S	: Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo;
34. Fanira Luthfia	: Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo;
35. Wangsit	: Kecamatan Kauman;
36. Arika	: Kecamatan Sukorejo;
37. Zulfianara A. Rini	: Kecamatan Siman;
38. Kukuh Dwi S.	: Kecamatan Jenangan;
39. Agus Hermansyah	: Kecamatan Sooko;
40. Wahyudi	: Kecamatan Pudak;
41. Mularto	: Kecamatan Sawoo;

42. Yunan A.P

: Kecamatan Mlarak;
43. Suratman

: Kecamatan Ngrayun;
44. Hariyadi

: Kecamatan Jambon.

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua;
Yth. Sdr. Bupati Ponorogo yang pada hari ini diwakilkan oleh Wakil Bupati Ponorogo
Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;
Yang Saya Hormati Anggota DPRD;
Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;
Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu
Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

**“ PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP USUL
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. PONOROGO TAHUN
ANGGARAN 2024 “.**

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 :

Jumlah Anggota DPRD	45 orang
Hadir	37 orang
Tidak Hadir	8 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Jumlah 8 orang
Hadir 8 orang
Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb
LENGKAP
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : Jumlah 10 orang
Hadir 8 orang
Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Evi Dwitasari, S.Sos. IJIN
 2. dr. Burhanudin TK
3. Fraksi Partai Nasdem : Jumlah 7 orang
Hadir 6 orang
Tidak Hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Mukridon Romdloni, S.T. IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Ghufroon Ridlo'i IJIN
 2. Imam Mustofa TK
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Yuliana IJIN
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. MOH. Komarudin, S.Ag., M.Si. IJIN
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
Hadir 3 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Udin Irchamna IJIN

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....**Pembacaan Doa**.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024 “.

Hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo yang pada hari ini diwakilkan oleh Wakil Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan :

1. Surat Bupati Ponorogo Nomor: **900.1.3.4/KRP/1458/405.24/2025** tanggal 28 Mei 2025 Perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024.

Berpedoman pada hal tersebut serta sesuai dengan perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan Juni Tahun 2025, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah **PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024.**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf (c), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 11.53 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Memasuki acara inti rapat paripurna hari ini, kita akan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudara Bupati Ponorogo pada rapat paripurna beberapa waktu yang lalu.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian yang sangat strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen ini tidak hanya menjadi bentuk formal pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, namun juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran berjalan.

Melalui forum Rapat Paripurna ini, Fraksi-Fraksi yang ada DPRD Kabupaten Ponorogo akan menyampaikan pandangan umumnya terhadap usulan Raperda tersebut. Pandangan umum fraksi merupakan representasi sikap politik dan komitmen masing-masing fraksi, yang diharapkan dapat memberikan masukan, catatan strategis, maupun dukungan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, kepada juru bicara Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo, kami persilakan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya secara bergiliran.

Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi, kami persilakan kepada :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Umumnya, dipersilahkan.
(setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudari Tri Suryati, A.Md yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya kami persilahkan dari Fraksi :

2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN untuk menyampaikan Pandangan Umumnya, dipersilahkan.
(setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Riyanto, S.IP. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

3. Fraksi Partai NasDem untuk menyampaikan Pandangan Umumnya, dipersilahkan.
(setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Agus Subianto yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

4. Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umumnya, dipersilahkan.
(setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

5. Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan Pandangan Umumnya, dipersilahkan.
(setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Elvis Wibisono yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

6. Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umumnya, dipersilahkan.
(setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Ayatullah Ali Syari'ati, S.H. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan Pandangan Umumnya, dipersilahkan.
(setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Ribut Riyanto, S.H. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

(Lampiran I)

PENUTUP

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati.

Mohon untuk menjadi perhatian bahwa Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, dengan agenda :

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Untuk itu, kami mohon kehadiran kembali seluruh pihak yang terkait agar proses pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tahapan yang telah dijadwalkan.

Demikian seluruh rangkaian agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Atas nama Pimpinan DPRD, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota Dewan, Saudara Bupati beserta jajaran Pemerintah Daerah, serta seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat ini dengan seksama. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID HAMDALLAH ...**

ALHAMDULILLAHIRABIL'ALAMIN.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat ditutup pukul 12.25 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024 “.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 02 Juni 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Selasa, 10 Juni 2025

**PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB.
PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB.
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024**

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Selasa, 10 Juni 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN

BANGSA



PANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat saudara Bupati, Wakil Bupati, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Segenap OPD Dilingkungan Pemkab. Ponorogo

Sidang Paripurna yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT, atas limpahan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas kita.

Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, teriring doa semoga kita mampu meneladani beliau dalam melaksanakan tugas pelayanan kita kepada masyarakat.

Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia

Dalam kesempatan ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Jajaran Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan atas terlaksananya seluruh program pembangunan selama tahun anggaran 2024. Apresiasi kita sampaikan atas diperolehnya Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk yang ketigabelas kalinya, semoga pencapaian inimenjadi pemicu bagi kita untuk bekerja lebih baik lagi.

Terima kasih juga kami sampaikan atas telah disusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 ini.

Sidang Paripurna yang berbahagia

Sebagaimana Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan sebagaimana Undang-undang nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan negara pasal 31 yang mana disebutkan bahwa Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas,

dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Fraksi Kebangkitan Bangsa telah mempelajari laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBD 2024 dan dinilai telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

Sidang Paripurna yang berbahagia

Selanjutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan tanggapan dan pertanyaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pandangan umum fraksi ini.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Teriring do'a semoga segala yang kita lakukan hari ini dan seterusnya senantiasa mendapatkan pertolongan dan ridlo Allah SWT.

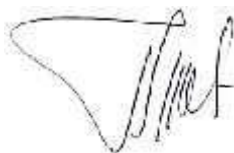
Wallohul muwafiq ila aqwam lthoriq
Wassalamu alaikum wr...wb...

Ponorogo, 10 Juni 2025

Pimpinan

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD Kabupaten Ponorogo**

Ketua



M U J I A T I N

Sekretaris



TRI SURYATI, A.Md

Lampiran:

Daftar Pertanyaan dan tanggapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Permasalahan fundamental dan yang perlu segera yg perlu diperbaiki setelah melihat laporan pertanggung jawaban APBD 2024 adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efisien, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
2. FKB menilai meskipun pendapatan dari sektor pajak dan retribusi secara teknis telah tercapai. Realisasi tersebut menunjukkan penurunan prosentase dari tahun sebelumnya. Hal ini perlu langkah kongkrit dalam memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak khususnya dari sektor-sektor potensial seperti retribusi parkir, pariwisata dan pelayanan umum. Sehingga Potensi pajak yang belum tergarap harus dimaksimalkan, pemerintah tidak boleh puas dengan angka yang tercapai di atas kertas.
3. FKB memberikan catatan tebal terkait dengan dana transfer dari pusat yg masih dominan. Dan mendorong Pemerintah Daerah mulai serius mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah secara mandiri terutama disektor sektor pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif lainnya.
4. Kinerja BUMD belum memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PAD, FKB berharap Pemerintah daerah agar melakukan reformasi pengelolaan dengan menerapkan management berbasis *merit system* dan menerapkan indikator kinerja yang terukur dan transparan. Dengan pengelolaan BUMD yang baik dan dapat meningkatkan PAD, maka BUMD baru lainnya akan tumbuh dan berkembang apalagi melihat potensi sumberdaya yang belum digarap dan tingkat kebutuhan masyarakat semakin bertambah besar.
5. FKB mencatat penjadwalan proyek infrastruktur yang masih dilaksanakan di akhir tahun anggaran, menjadi sangat berdampak pada penurunan kualitas pekerjaan dan keterlambatan manfaat bagi masyarakat. Proyek jalan dan irigasi mestinya dilaksanakan di awal tahun agar manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat dan kualitasnyapun tidak dikorbankan oleh karena waktu pelaksanaan yg mepet.
6. Program insentif guru Madin 100 ribu rupiah per bulan per guru, FKB berharap anggaran program insentif guru madin tersebut bisa ditingkatkan. Dan terhadap program BOSDA/BPPDGS yang bersumberkan dari APBD Provinsi sebanyak 6 bulan, FKB berharap kabupaten memberikan sharing sehingga BOSDA/BPPDGS bisa berjalan menjadi 12 bulan.
7. Disisi sosial, Angka kemiskinan yang masih tinggi dan laju penurunannya tidak terlalu signifikan. FKB mendorong Pemerintah agar menyusun afirmatif

berbasis data serta memperkuat integrasi bantuan sosial. Dan FKB mendorong optimalisasi BUMDesa dan koperasi sebagai pilar keuangan mikro yang adil dan berkelanjutan.

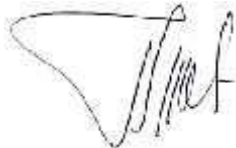
8. FKB mempertanyakan Realisasi APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 pada Penerimaan Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terealisasi pendapatan 0, sementara pada realisasi tahun – tahun sebelumnya dengan capaian pendapatan yang cukup signifikan?

Ponorogo, 10 Juni 2025

Pimpinan

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD Kabupaten Ponorogo**

Ketua



M U J I A T I N

Sekretaris



TRI SURYATI, A.Md

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Selasa, 10 Juni 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN

**PANDANGAN UMUM TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**



**FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

**FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmattullohi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Rahayu

M E R D E K A !!!

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo...

Bupati, Wakil Bupati beserta segenap unsur FORKOMPIMDA Kabupaten
Ponorogo...

Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD...

Rekan-rekan Tenaga Ahli Fraksi, Insan Pers, serta hadirin undangan yang
berbahagia...

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan menghadiri Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri taulan Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang selalu kita nantikan safa'atnya di yaumul qiyamah, allohumma amin.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, perkenalkanlah kami

mengucapkan terimakasih dan rasa hormat setinggi-tingginya atas disusun dan disampaikannya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK, sebagai bentuk komitmen untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Sidang Dewan yang terhormat,

Fraksi PDI Perjuangan maPAN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo yang kembali memperoleh sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 13 kalinya. Terhadap hasil tersebut, Fraksi PDI Perjuangan maPAN berharap agar terus dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap catatan-catatan dan Rekomendasi dari BPK yang masih ada, untuk segera ditindaklanjuti.

Sidang Dewan yang terhormat,

Fraksi PDI Perjuangan maPAN mengingatkan dan menegaskan tiga prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam semua tahapannya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan indikator dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada publik. Maka, dengan disampaikannya Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dari Sdr. Bupati perlu kita apresiasi bersama-sama.

Fraksi PDI Perjuangan maPAN berharap kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif yang terjadi selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Selain itu, kami juga berharap kepada seluruh OPD dapat mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati Ponorogo, sehingga dapat terwujud Ponorogo yang lebih HEBAT (*Harmonis*,

Elok, Bergas, Amanah, dan Takwa).

Sidang Dewan yang terhormat,

Menanggapi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kami Fraksi PDI Perjuangan maPAN dapat menerima. Namun perkenankan kami sampaikan beberapa pertanyaan, saran dan masukan terkait dengan Raperda tersebut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sebesar Rp347 miliar atau 95% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 366 miliar.

Mohon di jelaskan, kendala apa saja yang membuat target PAD tidak terpenuhi? Serta langkah apa yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD 2025?

2. Dengan memperhatikan geliat perkembangan ekonomi di wilayah pedestrian jalan emas segi delapan, mohon Pemerintah Daerah untuk lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap pajak restoran dan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Serta mohon kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk melakukan pembinaan kepada jukir, khususnya di jalan Gajah Mada dan Pertigaan Ngepos terkait penataan parkir kendaraan.
3. Meskipun alokasi anggaran sudah cukup besar di sektor Pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan maPAN menilai bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan maPAN mendorong agar Pemerintah Kabupaten Ponorogo lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi sarana pendidikan yang merata, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.
4. Dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat agar literasi berdemokrasi di Ponorogo semakin baik serta partisipasi politik masyarakat Ponorogo meningkat, maka Fraksi PDI Perjuangan maPAN mendorong kepada Pemerintah Daerah agar kenaikan Dana Bantuan Partai Politik yang sudah disepakati untuk segera di tindaklanjuti.

‘Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan maPAN terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga Allah SWT. senantiasa

memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Ponorogo Hebat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Rahayu...

Ponorogo, 10 Juni 2025

**FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**

Ketua



Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP



Sekretaris,



Siswand

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025**

Selasa, 10 Juni 2025

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM**



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO**

TERHADAP

**RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024**

PONOROGO, 10 JUNI 2025

Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024

Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Restorasi Indonesia !!!!

- **Yth. Bpk. H.Sugiri Sancoko, S.E, M.M. Bupati Ponorogo**
- **Yth. Ibu Hj Lisdyarita, S.H Wakil Bupati Ponorogo**
- **Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo**
- **Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati**
- **Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo**
- **Yth. Rekan – rekan pers serta hadirin undangan yang berbahagia**

Sebagai awal penyampaian Pandangan umum fraksi ini, kami megajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan Puji syukur kepada ALLAH SWT. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama – sama menghadiri rapat Peripurna dalam keadaan sehat wal-afiat.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti yang kita alami sekarang ini.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo : **tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.**

Rapat Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang secara konseptual bermuara kepada rakyat, sebagai pemberi mandat, baik bagi eksekutif maupun legislatif.

Tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam

mengelola dan menggunakan anggaran, tetapi juga sebagai sarana evaluasi atas capaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Oleh karena itu melalui sidang paripurna ini kami berharap pada tahun 2025 ini semua program prioritas dapat terlaksana dengan capaian sesuai yang ditargetkan.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, untuk penyempurnaan Laporan pertanggung jawaban ini, ijin Fraksi NasDem memberikan beberapa pandangan, pertanyaan serta masukan sebagai berikut :

1. Sudah mencapai berapa persen yang teralokasikan pada ADD sampai Tahun Anggaran 2024 ? Diluar ADD spesifik, mengingat dalam hal ini desa mendapatkan alokasinya bukan karena peraturan perundang - perundangan tetapi lebih karena kebijakan kepala Daerah. **(Mohon Penjelasan)**
2. Merujuk nota penjelasan bupati yang telah disampaikan sebelumnya, Fraksi NasDem mencermati belum terlihatnya pemetaan capaian program prioritas secara eksplisit dan terukur. Sedangkan ukuran keberhasilan seharusnya tidak hanya dilihat dari serapan anggaran atau banyaknya kegiatan yang terlaksana, melainkan dari dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. **(Mohon Penjelasan)**
3. Kami melihat dari data BPS, Di Kabupaten Ponorogo Produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 218,10 ribu Ton, mengalami penurunan sebanyak 8,82 ribu Ton atau 3,89 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 226,92 ribu Ton. Padahal pemerintah sudah punya program terobosan yang bisa menghasilkan panen 14 Ton per Hektare, kemana program tersebut, dan bagaimana hasilnya? lalu apa langkah pemerintah menyikapi hal tersebut ? **(Mohon Penjelasan)**
4. Fraksi NasDem berharap supaya pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum lebih ditingkatkan, seperti : pertanian, pendidikan, kesehatan untuk masyarakat, terutama infrastruktur jalan yang sangat dikeluhkan banyak masyarakat, karena

infrastruktur memiliki peran yang sangat signifikan sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah. **(Mohon Tanggapannya)**

5. Berkenaan dengan pola hubungan kemitraan Bupati dan DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara Pemerintahan, agar saling mendukung dan bekerjasama dengan baik, sehingga pokok – pokok pikiran Bupati dan DPRD benar – benar dapat membangun ponorogo dengan prinsip kesejahteraan masyarakat.

Hadirin yang kami hormati, Fraksi NasDem memandang bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekedar bentuk formalitas administratif, melainkan harus menjadi cerminan dari efektivitas kebijakan, efisiensi penggunaan anggaran, dan capaian pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Pada akhir Pandangan Umum ini fraksi NasDem sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ke tingkat pembahasan lanjutan.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Ponorogo ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Billahi Taufiq Wal- Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo , 10 Juni 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo

Fraksi Partai NasDem

Ketua,

Sekretaris,

SUNARTO, S.Pd

MUKRIDON ROMDLONI, S.T

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Selasa, 10 Juni 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GERINDRA

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO



TERHADAP
USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO, TERKAIT :
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024

PONOROGO, 10 JUNI 2025

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran
2024

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Salam Indonesia Raya !!!!

- Yth. Bpk. H.Sugiri Sancoko, S.E, M.M. Bupati Ponorogo
- Yth. Ibu Hj Lisdyarita, S.H Wakil Bupati Ponorogo
- Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati
- Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Rekan – rekan pers serta hadirin undangan yang berbahagia

Mengawali Pandangan umum fraksi ini marilah bersama – sama kita panjatkan Puji dan syukur kepada ALLAH SWT. yang telah memberikan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini masih dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti yang kita alami sekarang ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Berikut ini beberapa Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo :

Mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024

Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh PemKab ponorogo yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Setelah mempelajari isi Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan eksekutif, kami Fraksi Gerindra memberikan beberapa masukan dan pertanyaan sebagai berikut :

- 1.** Kami Fraksi Gerindra Menanyakan terkait anggaran terhadap Total anggaran bantuan dana ke RT dan berapa masing-masing RT. **(Mohon penjelasan)**
- 2.** Surplus sejumlah **Rp. Rp21.530.494.594,00** (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) Difungsikan untuk apa? **(Mohon Penjelasan)**
- 3.** Diterangkan Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 3.294.082.300.417,04** (Tiga Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Sen), **(mohon disebutkan dan jelaskan)**
- 4.** Sejauh mana APBD tahun anggaran 2024 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian? Program apa saja dan berapa anggaran yang

teralisasi untuk pemenuhan ketiga program tersebut? **(Mohon dijelaskan)**

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

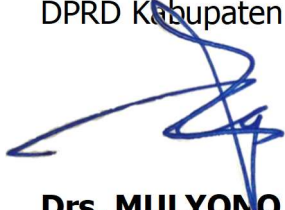
Pada akhir Pandangan Umum ini fraksi Gerindra sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ke tingkat pembahasan lanjutan, dengan terus perkuat sinergi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap rancangan peraturan daerah Ponorogo ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo , 10 Juni 2025

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
DPRD Kabupaten Ponorogo



Drs. MULYONO
KETUA

REYFAL BAYU ADJI P, S.IP
SEKRETARIS

SALINAN

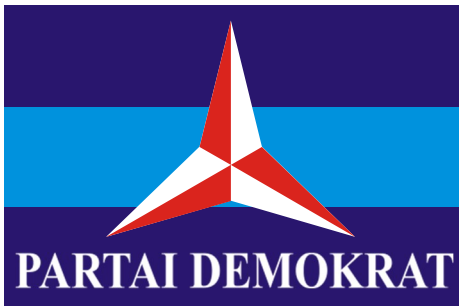
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025**

Selasa, 10 Juni 2025

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

TERKAIT:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024



DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KABUPATEN PONOROGO SELASA, 10 JUNI 2025

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO
TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdri. Wakil Bupati Ponorogo,

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo,

Yang kami hormati unsur Forpimda atau yang mewakili,

Yang kami hormati, Para Kepala Dinas, Badan, teman-teman media serta hadirin undangan yang berbahagia.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat. Tidak lupa kita kirimkan sholawat beriring salam

kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berpengetahuan seperti saat ini dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Beliau di Yaumil Mashsyar kelak. Amin.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati.

Setelah mendengarkan sambutan Bupati Ponorogo pada pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan mencermati draf, ada beberapa hal perlu kami sampaikan:

1. Kami Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah atas capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar

Rp 379.425.932.137,27 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen*) atau 98,70 % dari total estimasi PAD APBD Tahun 2024. Sebuah trend yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan, dalam rangka menuju Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Trilyun. Harapan kami ke depan APBD kita tidak selalu bergantung pada dana perimbangan. Mengingat saat ini banyak kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi proyeksi pendapatan dari dana perimbangan untuk Kabupaten/ kota.

2. Pada kesempatan ini kami juga sampaikan terkait realisasi PAD dari pos Pajak Parkir. Walaupun pada Raperda LKPJ Tahun Anggaran 2024 realisasinya memenuhi target yaitu 109,78%, namun kalau kita melihat kembali realisasi pos pajak parkir di tahun 2023 jumlahnya justru mengalami penurunan sekitar Rp 122.738.837,00 (*seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*). Apa yang menjadi kendala sehingga realisasi di tahun 2024 ini menurun daripada realisasi tahun 2023? ***Mohon Dijelaskan!***
3. Kami juga mencermati pos pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang realisasinya hanya sebesar 52,74%. Apa yang menyebabkan target realisasi jauh dari harapan? Mohon Dijelaskan! Ke depan pos pendapatan ini menurut hemat kami, perlu adanya sebuah terobosan, agar target realisasinya bisa terpenuhi.
4. Pos Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar realisasinya sebesar 75,41%. Walaupun realisasinya di tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023, namun capaian target di atas, masih jauh dari target yang diinginkan.

Terutama pada pos retribusi los realisasinya sebesar 55,79%. Kenapa hal ini terjadi? ***Mohon Dijelaskan!***

5. Pos pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) selain pada tahun 2024 ini realisasinya menurun dari tahun 2023. Tetapi realisasi tahun 2024 ini, juga tidak memenuhi target, yaitu hanya sebesar 68,14%. Kenapa target realisasi di tahun 2024 tidak tercapai, padahal dari estimasi jumlahnya justru menurun daripada realisasi tahun 2024. ***Mohon Dijelaskan!***

Keberadaan BUMD ini harapan kami, ke depan untuk dilakukan evaluasi dan dikaji kembali, agar BUMD yang ada mampu menyumbangkan PAD secara maksimal.

6. Kami mencermati terkait pos belanja di puskesmas kecamatan di seluruh Kabupaten Ponorogo. Banyak sekali pos belanja yang serapan anggarannya di bawah 90%. Menurut kami ke depan puskesmas kecamatan dalam melaksanakan perencanaan anggaran lebih efektif dan terukur sesuai kebutuhan. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini masih banyak belanja yang sifatnya urgen misalnya jalan, memerlukan anggaran yang cukup besar. Lebih dalam kami mencermati pada pos belanja pegawai di RSUD Bantarangin yang serapannya hanya 8,78%. Kenapa hal ini terjadi? ***Mohon Dijelaskan!***

7. Belanja tak terduga serapannya sebesar 62,99%. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, masih ada dibeberapa desa atau kecamatan yang jembatannya terputus maupun badan jalan amblas akibat bencana alam. ***Mohon dijelaskan!***

8. Pada kesempatan ini di luar dari Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu kami sampaikan terkait bantuan keuangan hibah partai politik, yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan pembahasan untuk segera ditindaklanjuti.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan. Harapan kami untuk menyempurnakan raperda ini menjadi sebuah peraturan daerah yang berkualitas kiranya bisa dibahas di rapat-rapat khusus. Selanjutnya kami haturkan terima kasih atas perhatiannya dan disampaikan mohon maaf bilamana dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

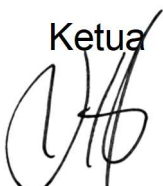
Ponorogo, 10 Juni 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

Ketua


WIDODO, SH.

Sekretaris

AGUS SUWITO

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Selasa, 10 Juni 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

TERHADAP

**USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG :**

**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

PONOROGO, 10 JUNI 2025



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
FRAKSI PARTAI GOLKAR

Jln. Aloon-aloon Timur No. 29 Telp (0352) 483864, Fax (0352) 483262
PONOROGO 63413

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

- Yth. Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko / yang mewakili, Sekretaris Daerah, beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Ponorogo ;
- Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo ; Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo
- Yth. Bapak/ibu Camat, Sekretaris Dewan, dan rekan-rekan Tenaga Ahli Fraksi, Wartawan serta seluruh undangan Rapat Paripurna yang berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, karunia dan perlindungan-nya yang kepada kita semua saat ini sehingga kita dapat menghadiri acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya kelak, aamiin. Dalam kesempatan ini, izinkan kami dari Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pandangan Umum pada hari ini, berdasarkan penyampaian Bupati Ponorogo pada Rapat Paripurna yang lalu tentang **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**, kami dari Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Raperda tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kami mendukung sepenuhnya untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD selanjutnya. Adapun secara umum Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Adapun secara umum Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami dari **Fraksi Partai Golkar** pada intinya senantiasa mendorong dan mengapresiasi Pemerintah Daerah atas penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang komprehensif dan terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Kami menekankan peningkatan daerah dan pengelolaan anggaran yang cermat untuk mencegah defisit di masa mendatang. ***Mohon tanggapannya.***
2. Selanjutnya mohon kami dijelaskan tentang :
 - a. Soal Pendapatan Daerah, mohon kami dijelaskan bagaimana rencana optimalisasi pendapatan dari aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal? ***Mohon penjelasannya.***
 - b. Soal Belanja dan Program Prioritas, mohon kami dijelaskan terkait dasar pemerintah dalam menentukan program prioritas dalam APBD 2024? Apa sesuai dengan RPJMD?, serta bagaimana eksekutif menjamin bahwa belanja bantuan sosial dan hibah dilakukan secara adil dan tepat sasaran? Apakah program-program prioritas dalam APBD 2024 telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata? ***Mohon penjelasannya.***
 - c. Soal Efisiensi dan Transparansi, mohon kami dijelaskan tentang langkah konkret pemerintah daerah dalam menghindari pemborosan anggaran atau proyek tidak efektif? Serta sejauh mana keterlibatan publik dalam penyusunan APBD 2024? ***Mohon penjelasannya.***
 - d. Soal Defisit dan Pembiayaan, mohon kami dijelaskan strategi Pemerintah Daerah untuk menutup defisit APBD 2024? ***Mohon penjelasannya.***
 - e. Soal Kinerja Perangkat Daerah (OPD), mohon kami dijelaskan evaluasi terhadap serapan anggaran OPD tahun sebelumnya? Apa langkah untuk meningkatkan realisasi anggaran? ***Mohon penjelasannya.***
 - f. Soal Sektor Khusus (Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur), mohon kami dijelaskan bagaimana Pemerintah Daerah menjamin pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok? Lalu apakah ada anggaran peningkatan layanan kesehatan pasca covid-19? ***Mohon penjelasannya.***
 - g. Soal Politik dan Anggaran Praktis, mohon kami dijelaskan bahwa mengingat tahun 2024 adalah tahun politik, bagaimana Pemerintah Daerah menjamin APBD tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis?

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ponorogo
Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Terima kasih atas segala perhatian hadirin sekalian dalam mengikuti penyampaian kami, mohan maaf apabila terdapat hal-hal yang secara tidak kami sadari dalam penyampaian ini telah melanggar norma dan etika yang berakibat terhadap perasaan hadirin sekalian.

Billahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi kita Semua.

EKO PRIYO UTOMO, S.T, M.E

Ketua Fraksi Partai Golkar

AYATULLOH ALI SYARI’ATI, S.H

Sekretaris Fraksi Partai Golkar

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Selasa, 10 Juni 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN

SEJAHTERA

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang terhormat Sdr. Bupati Kabupaten Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E, M.M

Yang terhormat Sdr. Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Hj. Lisdyarita, SH.

Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat Forkopimda Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat Sdr. Kepala Dinas, Camat dan hadirin undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dan yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Mengawali Pandangan Umum ini Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024, beserta laporan audit BPK yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13. Kami memandang bahwa laporan ini adalah

bagian penting dari prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, serta hak untuk didengar aspirasinya. Sebagai sarana informasi, laporan keuangan ini berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBD harus selalu berorientasi pada pembangunan yang berkeadilan, dengan mengedepankan pemerataan antar wilayah, keberpihakan kepada kelompok rentan, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi desa.

Kami berharap pelaksanaan APBD Tahun 2024 ini menjadi bahan evaluasi agar ditahun-tahun mendatang menjadi lebih baik. Kami juga mengajak seluruh elemen baik legislatif dan eksekutif untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan Ponorogo yang lebih adil, makmur, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional dan semangat otonomi daerah.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Di tengah keberhasilan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024 ini, kami terus mendorong agar pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat lebih, lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, karena itu kami memberikan catatan, saran dan masukan sebagai berikut:

1. Memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024, beserta laporan audit BPK yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13
2. Strategi Penanganan Jalan Rusak, Fraksi menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak. Diperlukan strategi anggaran yang fokus pada perbaikan ruas jalan secara tuntas dengan kualitas yang memadai agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pengguna jalan.

3. Mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan Integritas Tata Kelola Keuangan Daerah dengan baik, penguatan sistem pengendalian internal dan transparansi penggunaan anggaran menjadi fondasi penting dalam membangun budaya integritas di lingkungan aparaturnya pemerintah daerah.
4. Perlunya penertiban penambangan ilegal di Kecamatan Jenangan, kami berharap Pemerintah Daerah hadir memberikan solusi yang terbaik, karena selain merusak alam aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan. Penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal wajib dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam lebih tertib dan bermanfaat untuk masyarakat.
5. Fraksi kami menilai perlunya penertiban dan legalitas usaha tambang melalui koordinasi lintas sektor serta penyelarasan regulasi daerah. Hal ini penting agar sektor tambang dapat berkontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah secara legal, tertib, dan berkelanjutan.
6. Perlunya sistem pengawasan yang proaktif terhadap Aparatur Sipil Negara agar tidak menyalahgunakan jabatannya. Sehingga perlu memperkuat koordinasi antara Inspektorat, Kejaksaan, BPK, dan Ombudsman. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat jika ada temuan dan laporan terkait penyalahgunaan wewenang.
7. Fraksi mendorong Pemerintah Daerah untuk fokus pada program penanggulangan kemiskinan yang bersifat jangka panjang, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pelatihan keterampilan yang terhubung dengan pasar kerja yang nyata.
8. Transformasi desa berkembang menjadi desa maju harus menjadi prioritas. Penguatan peran BUMDesa secara strategis dan berkelanjutan sangat diperlukan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan desa. Pemerintah Daerah perlu memberikan pendampingan dan penguatan kelembagaan BUMDesa secara berkesinambungan.
9. Menyusun program yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar memaksimalkan pekarangan rumah dan lahan tegalan dengan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi seperti diantaranya Kopi Robusta yang mudah perawatannya, cepat berbuah dan dapat hidup di dataran rendah yang saat ini memiliki nilai jual tinggi.

10. Mendidik, mendampingi dan membangun jaringan penjualan ternak di masyarakat ke konsumen langsung, khususnya kambing atau domba, dimana ternyata saat ini kambing/domba dari peternak Ponorogo yang banyak menguasai pasar di Jakarta, Semarang maupun Gresik, namun peternak belum merasakan harga yang sesuai disebabkan panjangnya rantai penjualan yang banyak dikuasai para tengkulak.
11. Bantuan keuangan kepada partai politik yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan Masyarakat kami nilai masih terlalu kecil, karena itu Fraksi PKS berharap dana Banpol untuk dinaikkan.
12. Mendorong optimalisasi aset daerah baik tanah maupun bangunan secara efektif dan efisien karena pada dasarnya aset daerah dapat memberikan nilai ekonomis jika dikelola dengan baik, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat.

Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera, kami berharap agar catatan dan saran yang kami sampaikan dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Daerah dalam memperbaiki tata kelola anggaran ke depan, serta memastikan bahwa APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Terimakasih.

Wallaahumuwaqqi Ilaaqwaamithoriq, Fastabiqul khAirat Billaahi-Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ponorogo, Selasa, 10 Juni 2025

**FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
KETUA SEKRETARIS**

CHRISTINE HERY P

UDIN IRCHAMNA